



INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP
Open Budgets. Transform Lives.

e-Buletin

September-Oktober 2013 No. 74

Berita Terbaru dari Berbagai Acara di Seluruh Dunia

[Direktur Eksekutif IBP Merenungkan Pertemuan Puncak Open Government Partnership \(Kemitraan Pemerintah Terbuka\) 2013](#)

[Kesan Pertama: Open Government Partnership Menerbitkan Laporan Kemajuan Pertama](#)

[Open Budgets di Bank Dunia](#)

[IBP Meluncurkan Seri Webinar Mengenai Dampak Advokasi](#)

Data untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

[Money Politics Online PCIJ: Menggunakan Data Besar dan Kecil untuk Transparansi, Kemampuan Berhitung](#)

Masyarakat Sipil Saling Belajar

[Organisasi Masyarakat Sipil RRT dan Indonesia Bergabung untuk Membina Kemampuan](#)

Kemenangan Legislatif untuk Jaminan Makanan

[Menyusun Anggaran untuk Jaminan Makanan di India](#)



[Sukai Kami di Facebook](#)



[Ikuti kami di Twitter](#)

Transparansi Anggaran di *the Guardian* dan *the Economist*

Beberapa minggu terakhir ini sungguh menyenangkan bagi pendukung transparansi anggaran. Dua rumah media besar berskala internasional, yakni *the Guardian* dan *the Economist*, menerbitkan tulisan yang menekankan perlunya peningkatan transparansi anggaran dan mengutip *Open Budget Index* milik *International Budget Partnership* (IBP).

Yang Terakhir dalam Seri Lokakarya Pembinaan Kemampuan yang Diadakan IBP di Tunisia

Belum lama ini IBP mengumpulkan sekelompok aktivis dari Mesir dan Tunisia dengan para pendukung anggaran dari tujuh negara dalam rangka pertukaran pembelajaran, yang terakhir dalam seri lokakarya yang telah ditangani IBP selama delapan bulan terakhir. Hal-hal yang dibahas dalam lokakarya itu adalah akses ke informasi, penggunaan media dalam advokasi anggaran, hubungan antara hak azazi manusia dan anggaran, dan penggalangan warga negara seputar masalah anggaran. Dalam sesi mengenai akses ke informasi, para panelis berbicara mengenai tantangan yang ada dalam memperoleh informasi mengenai anggaran di negara mereka, bekerja di lingkungan yang sulit, dan bagaimana terlibat dengan pejabat pemerintah secara efektif. Dalam sesi mengenai media, pembicara membahas bagaimana organisasi mereka bekerja sama dengan saluran media, dan bagaimana mereka menggunakan berbagai macam teknik penjangkauan untuk mendukung perubahan. Panelis pada pertemuan mengenai hak azazi manusia membagikan wawasan mereka mengenai bagaimana organisasi mereka menggunakan analisa anggaran guna memperkuat argumentasi moral dan argumentasi mereka berdasarkan hak azazi manusia. Dalam diskusi pertemuan mengenai penggalangan warga negara, para aktivis berbicara mengenai upaya mereka, kebanyakan di tingkat sub nasional, untuk melibatkan warga negara dalam masalah anggaran dan pemantauan anggaran. Lokakarya tersebut memungkinkan peserta memikirkan banyak cara untuk melaksanakan pekerjaan anggaran dalam masyarakat mereka sendiri. IBP berharap bahwa pertukaran pembelajaran ini, di samping semua pelatihan sebelumnya, telah memberikan sederetan sarana kepada para aktivis dari Mesir dan Tunisia untuk dapat mendukung perubahan dengan lebih efektif.

Selamat Datang, Anggota Staf Baru IBP!

Mari kita mengucapkan selamat datang kepada Anjali Garg ke IBP! Anjali adalah petugas program *Open Budget Initiative* untuk wilayah Asia. Sebelum bergabung dengan IBP, Anjali adalah ekonom di Kantor Urusan Luar Negeri Departemen Keuangan A.S., dan pekerjaan beliau berfokus pada Israel, Libya, Tunisia, dan Palestina. Anjali juga pernah bekerja di Dana Moneter Internasional di Departemen Timur Tengah dan Asia Tengah.

Sudut Blog

[Tampilan Tulisan Terbaru dari Blog *Open Budgets*](#)

Perawatan Kesehatan dan Anggaran

[Bagaimanakah Dana Publik di Pedesaan Digunakan? Penelitian Mengenai Dana Fleksibel di Berbagai Fasilitas Kesehatan di India](#)

Publikasi

[Publikasi IBP](#)

[Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini](#)

Lowongan Kerja

[Lowongan Pekerjaan di IBP: Petugas Program Pelatihan](#)

Berita Terbaru dari Berbagai Acara di Seluruh Dunia

Direktur Eksekutif IBP Merenungkan Pertemuan Puncak Open Government Partnership (Kemitraan Pemerintah Terbuka) 2013, oleh Deidre Huntington, *International Budget Partnership*



Pada tanggal 31 Oktober-1 November, lebih dari 1.000 delegasi yang mewakili lebih dari 60 negara berkumpul di London untuk menghadiri Pertemuan Puncak [Open Government Partnership](#) (OGP) 2013. Tujuan Pertemuan Puncak ini adalah untuk merenungkan apa saja yang berhasil dan tidak berhasil mengenai OGP, dan untuk mengilhami semua peserta agar diperlengkapi ketika pulang guna mengejar agenda reformasi yang jauh lebih ambisius.

Direktur Eksekutif IBP Warren Krafchik, sekaligus menjabat sebagai pimpinan yang segera berakhir masa jabatannya di OGP, menuangkan pemikiran dan perspektif beliau mengenai Pertemuan Puncak tersebut dalam sebuah wawancara.

Deidre Huntington: Dalam pidato pembukaan paripurna Anda, Anda berkata bahwa OGP perlu mengintensifkan upayanya dalam mengubah keterlibatan antara pemerintah-warga negara, bertujuan lebih tinggi untuk mencapai lebih banyak hal, melindungi ruang masyarakat sipil, dan memicu potensi tindakan bersama oleh OGP. Apakah Anda merasa bahwa kemajuan ke arah semua tujuan ini terjadi dalam Pertemuan Puncak tersebut?

Warren Krafchik: Dalam pidato saya, saya berusaha membuat garis besar agenda untuk OGP ke depan selama dua tahun mendatang. Bukan dimaksudkan untuk menjadi agenda yang akan dicapai dalam Pertemuan Puncak tersebut. Pertemuan Puncak itu merupakan kesempatan bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk melakukan pertukaran yang jujur mengenai kemajuan yang telah kami capai dan berbagai tantangan yang kami hadapi dalam melaksanakan OGP. Banyak sesi di Pertemuan Puncak itu memberi kesempatan untuk membahas semua masalah ini secara langsung dan pada akhirnya saya percaya bahwa terdapat pengakuan yang lebih luas bahwa setiap masalah ini harus menjadi prioritas ke depan. Kami meninggalkan Pertemuan Puncak tersebut dengan pemahaman yang lebih baik mengenai garis besar setiap masalah, dan jalan keluar yang lebih kuat untuk menanganinya melalui tindakan di tingkat negara dan tingkat internasional.

Huntington: Peranan apa yang dimiliki oleh lima kelompok kerja yang diluncurkan di Pertemuan Puncak tersebut dalam mengejar semua tujuan di atas?

Krafchik: Fokus kegiatan dalam OGP telah beralih ke tingkat negara. Tanggung jawab pelaksanaan ini sekarang ada pada pegawai negeri sipil dan masyarakat sipil di setiap negara OGP. Peranan kelompok-kelompok kerja ini adalah mendorong pelaksanaan yang efektif dengan menyediakan ruang bagi dukungan teknis dan pertukaran pakar – jenis dukungan yang benar-benar menjadi isi teknis pelaksanaan. Negara-negara dan masyarakat sipil mempelajari banyak hal dari satu sama lain. OGP adalah harta pengalaman yang ditemukan, dan semua kelompok kerja tersebut merupakan kesempatan untuk memanfaatkan dan membagikan semua pelajaran ini, dalam konteks berlomba ke puncak teratas.

Huntington: Beberapa tantangan apa saja yang disampaikan dalam pertemuan masyarakat sipil yang diadakan sebelum Pertemuan Puncak?

Krafchik: Sulit menyamaratakan seluruh organisasi masyarakat sipil pada pertemuan itu karena pengalaman tingkat negara benar-benar beraneka macam. Saya percaya bahwa semangat hari masyarakat sipil adalah seimbang – hampir semua OMS terlibat dalam OGP dan merasa optimis mengenai kemungkinan keuntungan yang diraih. Tetapi mereka juga prihatin karena setidaknya ada beberapa negara yang tidak serius dalam komitmen mereka terhadap OGP. Mungkin mereka mencari pengakuan internasional dalam berpartisipasi dalam OGP, namun tidak bersedia mengeluarkan energi dan modal politik. Ada pula keprihatinan mengenai kualitas proses konsultasi. Banyak negara tidak berpengalaman atau tidak berkomitmen untuk terlibat dengan spektrum masyarakat sipil yang paling luas, atau konsultasi ini tidak konsisten. Akhirnya, ada keprihatinan mengenai sifat komitmen tersebut – banyak di antaranya tidak memiliki ambisi atau tidak berfokus pada prioritas sebenarnya untuk pemerintahan terbuka.

Huntington: Anda dan lainnya berkata bahwa persyaratan kelayakan bagi negara-negara untuk bergabung dengan OGP dan ketentuan pemberian sanksi pada negara-negara OGP mungkin perlu disesuaikan agar lebih dapat melindungi ruang masyarakat sipil. Adakah kemajuan yang dicapai dalam hal ini?

Krafchik: Pertemuan Puncak itu bukan tempat untuk mencapai kemajuan mengenai kedua hal ini. Kedua hal ini bukan merupakan aturan permainan dan harus diselesaikan pada tingkat Panitia Pengarah. Tetapi Pertemuan Puncak itu menjelaskan bahwa sejumlah besar organisasi masyarakat sipil yang hadir (dan minimal beberapa pemerintahan) merasa bahwa kami perlu berpikir kembali mengenai cara membuat ulang semua aturan permainan tersebut dengan cermat agar lebih memastikan kesuksesan kemitraan ini.

Huntington: IBP, OGP dan berbagai organisasi lain selama ini mendesak agar tata kelola pemerintahan yang baik menjadi bagian kerangka kerja pasca tahun 2015. Menurut Anda, apakah Pertemuan Puncak OGP dan berbagai pembicaraan yang lahir darinya akan membantu dalam advokasi ini?

Krafchik: Saya harap demikian, tapi saya belum tahu. Seperti yang saya sebutkan dalam pidato saya, OGP bisa berdampak besar atas pembicaraan mengenai pasca tahun 2015. Menurut saya, hal ini mendapatkan dukungan masyarakat sipil yang kuat dan luas, dan setidaknya beberapa pemerintahan berkomitmen terhadap hal ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya OGP dapat mengaktifkan kepentingan ini? Menurut saya, kami membutuhkan struktur yang mampu mengembangkan posisi OGP yang mencerminkan seluruh spektrum negara-negara yang terlibat dan mengidentifikasi cara-cara untuk menggunakan hal ini guna mengirimkan pesan yang kuat dan konsisten dan proposal dalam konteks proses PBB. Kami harus berhati-hati agar tidak memperluas birokrasi OGP, namun kami memang membutuhkan cara-cara untuk mendapatkan dukungan kuat dari sebanyak mungkin negara OGP untuk Persatuan Bangsa-Bangsa.

Huntington: Dengan turunnya Anda dari jabatan sebagai salah satu pimpinan masyarakat sipil, peranan apa yang akan dimainkan oleh OGP di tahun-tahun mendatang?

Krafchik: IBP akan terus mendukung OGP di tingkat negara dan tingkat internasional. Kami akan bekerja sama dengan para mitra di berbagai negara, dan dengan berbagai pemerintahan secara langsung yang masuk akal. Saya akan tetap berada di Panitia Pengarah selama setahun lagi untuk mendukung proses internasional ini.

Huntington: Adakah pratinjau mengenai apa yang dapat kami harapkan pada agenda untuk Pertemuan Puncak berikutnya?

Krafchik: Pertemuan Puncak berikutnya mungkin akan berlangsung dua tahun lagi dan akan diadakan oleh Meksiko. Pada saat itu, kami pasti sudah akan memiliki laporan Mekanisme Laporan Independen mengenai rencana tindakan ke dua dari setiap negara. Jadi, harapkan diskusi yang kuat mengenai kinerja. Pertemuan-pertemuan OGP tahun depan akan berfokus pada tingkat regional, dengan acara "Kepala Negara Bagian" yang lebih kecil di margin Majelis Umum PBB.

Kesan Pertama: *Open Government Partnership Menerbitkan Laporan Kemajuan Pertama*, oleh Joseph Foti, Manajer Program, *Open Government Partnership*

OGP adalah inisiatif multilateral yang diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan menjamin komitmen konkrit dari pemerintah-pemerintah guna mendorong transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan berbagai teknologi baru demi memperkuat pemerintahan. Dalam semangat kerjasama beberapa pemangku kepentingan, OGP diawasi oleh Panitia Pengarah, termasuk perwakilan-perwakilan pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Untuk menjadi anggota OGP, negara peserta harus mendukung Deklarasi Pemerintahan Terbuka tingkat tinggi, memberikan rencana tindakan tingkat negara untuk reformasi konkrit yang dikembangkan dengan konsultasi dengan publik, dan berkomitmen untuk memberikan laporan independen mengenai kemajuan mereka melalui *Independent Reporting Mechanism* (IRM/Mekanisme Laporan Independen).

Sudah satu tahun sejak IRM mempekerjakan anggota staf pertamanya dan mulai menciptakan Panel Pakar-pakar Internasional. Pada bulan Oktober, IRM menerbitkan delapan laporan kemajuan pertama untuk dikomentari masyarakat bagi setiap negara pendiri dan mempekerjakan lebih dari 40 peneliti nasional untuk sekelompok laporan IRM mendatang yang sangat banyak. Meskipun proses ini masih dalam tahap awal, IRM telah dapat membangun beberapa kesan awal.

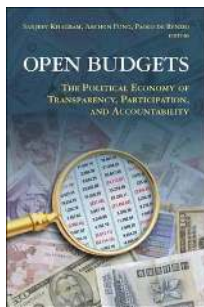
Pelajaran untuk OGP

- **Kepemilikan dan mandat:** Kesuksesan pelaksanaan rencana tindakan sebagian besar tergantung pada bagian mana dari administrasi yang memiliki kekuasaan untuk melakukan koordinasi dan mengambil keputusan. Di negara-negara di mana hal ini terbatas pada kementerian administrasi publik, reformasi terutama hanya bersifat internal dan tidak bersifat mendasar bagi reformasi demokrasi.
- **Menciptakan Bersama dan melaksanakan bersama:**
 - *Jumlah kerja sama:* Negara-negara memiliki jumlah kerjasama yang sangat bervariasi dalam mengembangkan rencana tindakan mereka, mulai dari sangat bekerja sama (khususnya mengenai OGP) hingga lebih sederhana namun tetap merupakan kerjasama yang patut dipuji, hingga hampir tidak ada kerja sama. Beberapa negara memperlihatkan bukti yang kuat bahwa mereka belajar di sepanjang prosesnya, misalnya Inggris, yang amat sangat meningkatkan jumlah konsultasi dan luasnya organisasi yang dikonsultasi selama tahun 2012-2013.
 - *Meningkatkan kesadaran:* Secara umum, kurang ada kesadaran mengenai OGP atau pemajuannya sebagai landasan advokasi. Tampaknya tidak banyak negara yang memajukan OGP sebagai landasan untuk mendorong reformasi. Tampaknya Amerika Serikat merupakan perkecualian, dengan adanya sejumlah komitmen yang dibuat hingga menjangkau luar ibukota dan menyedot pendukung dari berbagai daerah.

- *Umpan balik mengenai konsultasi:* Dari negara-negara yang dinilai, hampir tidak ada yang memberikan ringkasan komentar. Meksiko merupakan perkecualian yang patut dipuji, dan memberikan umpan balik sangat langsung kepada peserta mengenai bagaimana proposal-proposal mereka disertakan ke dalam rencana tindakan yang diperluas (*Plan Ampliado*). Praktek terbaik dalam konsultasi ini adalah diharuskan oleh Pasal mengenai Tata Kelola Pemerintahan milik OGP dan secara mengejutkan masih kurang.
- **Sudah ada sebelumnya vs. komitmen-komitmen baru:** Rencana tindakan dipenuhi oleh komitmen-komitmen yang sudah ada sebelumnya. Tidak semuanya negatif, karena memadukan dalam rencana OGP dapat mempercepat pelaksanaan, atau menambah lapisan transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban, dan pasti konsisten dengan Pasal mengenai Tata Kelola Pemerintahan milik OGP. Tetapi jelas terlihat dari berbagai wawancara yang dilakukan sebagai bagian dari proses IRM, bahwa komitmen yang sudah ada sebelumnya merupakan sumber kekecewaan dalam prosesnya dan bisa menjadi masalah kredibilitas jangka panjang bagi OGP.
- **Ambisi politik vs. ambisi teknis atau kesulitan:** Delapan rencana tindakan pertama yang dinilai oleh IRM berisi sejumlah komitmen politik yang ambisius. Semua rencana tersebut juga cenderung menjadi komitmen yang tidak dilaksanakan atau yang diserahkan pemerintah – dalam penilaian sendiri yang mereka lakukan– berbagai tindakan alternatif (tidak termasuk dalam rencana tindakan asli) sebagai bukti penyelesaian. Bahayanya, dinamika ini akan memberi penghargaan pada negara-negara yang memiliki rencana politik yang kurang ambisius dan kemungkinan yang paling buruk adalah menyusutkan OGP menjadi pemerintahan elektronik, dan kemungkinan yang paling baik adalah menjadi inisiatif promosi data terbuka.
- **Persyaratan kelayakan dan kinerja:** Delapan laporan IRM pertama tidak menemukan bukti bahwa persyaratan kelayakan untuk menjadi negara mitra merupakan prediksi kinerja negara atas komitmen yang ditetapkan sendiri atau atas proses OGP. Ini bukan berarti bahwa persyaratan kelayakan bersifat tidak relevan, namun kegunaannya terbatas: Persyaratan kelayakan bukan merupakan prediksi mengenai keterbukaan atau komitmen terhadap OGP.

Meskipun penting, penting untuk diulangi lagi bahwa ini merupakan wawasan pendahuluan. Tetapi delapan laporan IRM pertama menunjukkan sejumlah masalah yang harus dipantau dan digali oleh OGP di saat melangkah ke tahap berikutnya dalam perkembangan rencana tindakan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Open Budgets di Bank Dunia, oleh David Robins, International Budget Partnership



Paolo de Renzio, dari penelitian senior IBP, belum lama ini menyajikan penemuan dari buku [*Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability*](#) (Ekonomi Politik dari Transparansi, Partisipasi, dan Pertanggungjawaban) dalam sesi informasi saat istirahat makan siang yang diadakan oleh *Public Sector Anchor* Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (*Poverty Reduction and Economic Management /PREM*) Bank Dunia dan Komunitas Praktek atas Transparansi Fiskal (*Community of Practice on Fiscal Transparency*). De Renzio adalah salah satu editor buku tersebut. Selain de Renzio, panel itu juga dihadiri oleh Barak Hoffman, yang menulis satu bab mengenai reformasi transparansi anggaran di Tanzania dan merupakan Pakar Sektor Publik untuk PREM,

Wilayah Afrika, Bank Dunia.

Mereka berbicara dalam ruangan yang penuh sesak mengenai penelitian mereka, termasuk bagaimana dan mengapa kemajuan dalam hal transparansi fiskal terjadi, dan dalam kondisi dan melalui mekanisme mana peningkatan transparansi fiskal ini menghasilkan pertanggungjawaban dan tanggapan pemerintah yang lebih baik. Dalam panel itu, tampil pula pembahas Anand Rajaram, Pimpinan Praktek Tata Kelola Pemerintahan dari PREM Wilayah Afrika, Bank Dunia, dan Robert Hunja, Manajer Lembaga Bank Dunia.

Yang agak mengejutkan, ada beberapa penelitian lengkap mengenai asal transparansi fiskal dan hasil-hasil advokasi anggaran. *Open Budgets* berupaya mengisi kesenjangan ini dengan menggabungkan

penemuan-penemuan dari serangkaian penelitian kuantitatif mengenai berbagai pengaruh faktor politik, kelimpahan sumber daya, ketergantungan pada bantuan, peringkat kredit berdaulat, dan hasil-hasil pembangunan manusia atas transparansi anggaran di seluruh negara, di mana delapan studi kasus kualitatif secara mendalam melihat lintasan-lintasan reformasi transparansi negara-negara selama dua sampai tiga puluh tahun terakhir.

[Baca](#) atau [saksikan](#) penyajian de Renzio.

IBP Meluncurkan Seri Webinar mengenai Dampak Advokasi, oleh Jennifer Sleboda, *International Budget Partnership*

Pada tanggal 19 September, IBP mengadakan webinar pertama dalam Seri Jalur Dampak (*Impact Pathways*) yang baru, yang berfokus untuk memetik pelajaran mengenai bagaimana advokasi anggaran masyarakat sipil bisa menebarkan dampak dari [studi-studi kasus](#) IBP. Webinar bertema “Menggunakan Litigasi untuk Advokasi Anggaran” ini menyoroti kasus tiga organisasi yang telah berhasil menggunakan litigasi dalam kampanye advokasi anggaran mereka: *La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia* (*Civil Association for Equity and Justice/Asosiasi Sipil untuk Kesetaraan dan Keadilan/ACIJ*) di Argentina dan *Treatment Action Campaign* (Kampanye Tindakan Perawatan) dan *Legal Resources Centre* (Pusat Sumber Daya Hukum) di Afrika Selatan.

Tujuan webinar yang difasilitasi melalui landasan *online GoToTraining* ini adalah agar peserta menarik pelajaran dari berbagai studi kasus litigasi dan menyatukan pembelajaran ini di seluruh studi kasus litigasi, agar menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan advokasi anggaran organisasi mereka sendiri.

Webinar ini diikuti oleh 17 orang yang mewakili tujuh organisasi masyarakat sipil (OMS), satu organisasi donor, dan IBP, di samping enam negara (Argentina, Mesir, India, Meksiko, Afrika Selatan, dan A.S.).

Yang mulanya direncanakan sebagai sesi dua jam ternyata menjadi diskusi langsung selama tiga jam berisi cara menghubungkan analisa anggaran dengan litigasi, cara-cara melakukan litigasi saat menghadapi batasan-batasan organisasi (misalnya: sumber daya keuangan, akses ke pengacara), dan berbagai macam situasi dan konteks di mana litigasi bisa digunakan sebagai taktik advokasi, dan sebagainya.

Penyajian mengenai cara organisasi-organisasi telah menggunakan litigasi untuk advokasi disampaikan oleh peneliti studi kasus ACIJ, di samping anggota staf ACIJ, *Center for Economic and Social Rights* (Pusat Ekonomi dan Hak-hak Sosial) Mesir, *Sonora Ciudadana* (Meksiko), dan dua organisasi Afrika Selatan, *Social Justice Coalition* (Koalisi Keadilan Sosial), dan *Public Service Accountability Monitor* (Pemantauan Pertanggungjawaban Layanan Publik).

Secara keseluruhan, webinar itu sukses dalam hal landasan pembelajaran baru dan isinya. Seperti yang dijelaskan oleh seorang peserta, “Saya suka karena kami terlibat seketika dengan satu sama lain meskipun dipisahkan oleh jarak. . . Selain itu, menyenangkan rasanya berkomunikasi dengan sebagian orang yang kami baca dalam studi-studi kasus itu. . . [dan] saya menghargai poin-poin yang memperlihatkan cara melakukan litigasi dan kapan melakukannya.”

Meskipun diskusi tersebut berjalan dengan kuat, dalam waktu sesingkat itu sulit menyelami semua masalah yang muncul dengan mendalam. Untuk mengatasi hal ini dalam webinar Jalur Dampak di masa mendatang, IBP berencana akan mengorganisir webinar mengenai pertanyaan-pertanyaan tertentu, bukannya tema-tema yang luas. Sehingga kami akan dapat membuat percakapan secara lebih ketat dan mengizinkan peserta untuk memetik lebih banyak pelajaran konkrit untuk pekerjaan mereka. Dalam menanggapi umpan balik peserta, juga akan ada lebih sedikit penyajian dan lebih banyak waktu untuk pertanyaan dan diskusi.

Seri Webinar Jalur Dampak dikembangkan bersama oleh program-program Pembinaan Kemampuan dan Pembelajaran IBP untuk menanggapi permintaan dari para mitra IBP yang terdiri dari masyarakat sipil. Khususnya, para mitra meminta kesempatan untuk mengamati studi-studi kasus dampak IBP secara mendalam, guna mempelajari berbagai strategi dan taktik khusus yang digunakan oleh OMS dalam studi-studi kasus tersebut, di samping merenungkan apa yang mensukseskan advokasi anggaran dan bagaimana semua pelajaran tersebut dapat dimasukkan ke dalam pekerjaan advokasi anggaran mereka sendiri.

Mulanya, IBP merencanakan lokakarya selama tiga hari di mana para mitra akan menganalisa hingga 10 studi kasus. Tetapi untuk menguji webinar sebagai media pembelajaran baru, menyertakan kisaran peserta yang lebih luas dalam diskusi itu, memfasilitasi berbagai kesempatan pembelajaran intensif yang lebih sering dan menggunakan lebih sedikit sumber daya, dan berfokus pada lebih sedikit studi kasus pada satu waktu, IBP memutuskan untuk mengganti lokakarya itu menjadi seri webinar.

Perhatikan ruang ini untuk informasi mengenai webinar berikutnya dalam Seri Webinar Jalur Dampak!

Data untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Money Politics Online PCIJ: Menggunakan Data Besar dan Kecil untuk Transparansi, Kemampuan Berhitung, oleh Malou Mangahas, Direktur Eksekutif, *Philippine Center for Investigative Journalism*

Enam bulan lalu pada Hari Kebebasan Pers Dunia (3 Mei 2013), [Philippine Center for Investigative Journalism](#) (PCIJ) meluncurkan situs web [Money Politics Online](#), yakni sarana sumber daya dan penelitian bagi warga negara dalam hal politik, dana masyarakat, pemilihan umum, dan tata kelola pemerintahan di Filipina. Ini merupakan upaya paling berani yang dilakukan oleh PCIJ dalam dunia data besar, data terbuka, dan jurnalisme data.

PCIJ adalah badan media nirlaba dan tanpa saham yang didirikan pada tahun 1989 untuk membantu memupuk budaya laporan investigasi. Sejak saat itu, PCIJ telah menghasilkan lebih dari 1.200 laporan investigasi dan lusinan dokumenter maupun buku berdurasi singkat maupun penuh, dan mengadakan lebih dari 120 seminar pelatihan bagi jurnalis di seluruh Asia Timur, kawasan Pasifik, dan Afrika. Laporan investigasi telah memungkinkan PCIJ untuk memanfaatkan jurnalisme bagi transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kekuatan data dan informasi.

Lima tahun lalu, PCIJ mulai mengembangkan *Money Politics Online*, satu *database*, pada satu waktu. Panen informasi pertama itu berisi sederetan data unik sebesar 59 gigabyte berisi 6.500 pejabat publik, dana masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan pemilihan umum mulai tahun 1998. Proyek tersebut terus berkembang. Dan pada tahun 2011, *Open Society Foundation* memberikan hibah selama tiga tahun kepada PCIJ untuk mengembangkan versi pertama bagi situs webnya.

PCIJ mendirikan *Money Politics Online* guna memajukan hak warga negara Filipina untuk memperoleh informasi dan melakukan partisipasi yang bermakna dalam tata kelola pemerintahan. *Money Politics Online* menghubungkan rincian dalam statistik kisah-kisah yang membentuk inti pekerjaan PCIJ: bagaimana pemerintah membelanjakan dana masyarakat; kekayaan pejabat yang dipilih dan ditunjuk; keuangan kampanye dan pemilihan umum; kontrak dan kontraktor publik; keluarga politik dan politik; dan kemajuan maupun kemunduran dalam rumah tangga nasional. Situs web ini dibuahi dan dibuat karena PCIJ percaya bahwa beberapa tujuan publik dapat membantu agar jurnalisme yang baik, kewarganegaraan yang baik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berakar dengan kuat.

Salah satu tujuan tersebut adalah kemampuan berhitung. Meskipun tingkat keaksaraan rakyat Filipina merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, banyak di antara mereka tidak mengerti matematika. Namun kebanyakan masalah yang amat sangat penting yang menghambat tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan di Filipina seringkali sangat berkaitan dengan angka. Jadi warga negara

harus mampu memahami angka-angka ini untuk dapat terlibat sepenuhnya .

Tujuan lainnya adalah mendorong pembukuan yang baik di semua badan publik sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Sayangnya, di Filipina hanya ada segelintir praktisi yang baik untuk mengarsip, mengorganisir, memperbaharui, dan membagikan data di antara dan di kalangan badan-badan publik, dan dengan warga negara serta media.

Money Politics Online adalah pekerjaan yang tengah berlangsung. PCIJ terus-menerus mengunggah aliran yang stabil berisi sederetan data baru, profil lengkap para pejabat lokal yang dipilih, dan konten lokal mengenai semua propinsi, kota kecil, dan kota besar di Filipina. Pekerjaan ini akan selesai sepenuhnya sebelum bulan Mei 2016, ketika warga negara Filipina akan memilih presiden baru, para senator baru, para anggota kongres baru, para gubernur baru, dan para walikota baru. Dengan bantuan *Money Politics Online*, rakyat Filipina mampu menulis kisah-kisah yang lebih baik mengenai kebebasan, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Masyarakat Sipil Saling Belajar

Organisasi Masyarakat Sipil RRT dan Indonesia Bergabung untuk Membina Kemampuan, oleh Ma Jifang dan Zhang Lanying

Apakah perbedaan dalam konteks dan pemahaman pekerjaan anggaran antara Indonesia dan RRT? Dapatkah pengalaman organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia ditiru di RRT? Sumber daya manusia dan keahlian teknis tertentu apakah yang dibutuhkan untuk pelacakan anggaran? Dampak apa saja yang dirasakan oleh OMS Indonesia selama 15 tahun terakhir dalam pelacakan anggaran, dan bagaimanakah OMS RRT dapat belajar dari upaya mereka?

Dengan mengingat semua pertanyaan ini, delapan peserta dari tiga OMS RRT berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 September untuk melakukan studi wisata selama seminggu.

Tujuan perjalanan itu adalah agar OMS RRT mempelajari hal-hal berikut dari OMS Indonesia:

- menggalang anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses anggaran;
- mengakses informasi anggaran;
- bekerja dengan angka-angka anggaran untuk mendukung tuntutan masyarakat sipil;
- menentukan sarana dan teknis advokasi apa saja yang efektif, dan bagaimana penggunaannya; dan
- menjalin hubungan dengan badan-badan pemerintah dalam berbagai cara.

Dengan didukung oleh IBP, OMS RRT tersebut semuanya memulai proyek percobaan pelacakan anggaran pada bulan April 2013. Meskipun semua kelompok tersebut berpengalaman dalam bekerja sama dengan masyarakat dan dalam hal partisipasi publik, analisa anggaran masih merupakan hal baru bagi mereka. Eco Canton didirikan pada tahun 2009 dan berfokus pada masalah penanganan sampah di Kota Guangzhou. Proyek Eco Canton yang ada saat ini adalah bertujuan untuk menggunakan saluran-saluran penyingkapan informasi guna mengumpulkan dan menganalisa informasi anggaran tahun 2012-2013 yang berkaitan dengan penanganan sampah di Guangzhou. *Huizhi Participation Center* (Pusat Partisipasi Huizhi) yang berpusat di Chengdu berkomitmen terhadap partisipasi publik dan pemajuan keadilan sosial dan pembangunan sosial. *Huizhi Participation Center* berencana mengembangkan *database* dana layanan publik tingkat pedesaan, di samping berbagai studi kasus mengenai cara memanfaatkan semua dana itu. *Shining Stone Community Action Center* adalah organisasi nirlaba yang berpusat di Beijing dengan misi melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Tujuan mereka adalah menelusuri semua wawancara, diskusi kelompok, dan penelitian dokumenter, permohonan dana layanan publik masyarakat perkotaan dan persetujuan serta penggunaan dana layanan publik masyarakat perkotaan.



Delegasi RRT tersebut bertemu dengan empat faktor utama dalam gerakan anggaran masyarakat sipil Indonesia: Inisiatif, yang memajukan reformasi kebijakan publik; Lakpesdam, sebuah organisasi massa agama; Pattiro, yang dikenal oleh OMS maupun pejabat pemerintah karena terlibat dalam berbagai inisiatif kolaboratif; Fitra, sebuah organisasi analisa anggaran yang terkemuka; dan *Asia Foundation* (Yayasan Asia) Kantor Jakarta. *Asia Foundation* adalah organisasi pembangunan internasional nirlaba yang berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup di seluruh Asia. Yayasan ini memberikan dukungan jangka panjang kepada semua organisasi ini. Pekerjaan anggaran masyarakat sipil di Indonesia

dimulai setelah tahun 1998 dan dipicu oleh Reformasi (ketika mantan Presiden Suharto mengundurkan diri, sehingga memunculkan lingkungan politik yang lebih terbuka) dan desentralisasi anggaran. Hampir semua OMS di Indonesia melakukan pekerjaan anggaran di samping berbagai kegiatan lain, dengan menggunakan sarana ini untuk memperkuat advokasi dan penggalangan mereka, sementara beberapa OMS terutama berfokus pada pekerjaan anggaran.

Selama pertemuan itu, para delegasi RRT membandingkan konteks untuk pekerjaan anggaran dan advokasi masyarakat sipil serta mengidentifikasi semua perbedaan ini:

- Sentralisasi RRT vs. desentralisasi Indonesia;
- Media yang dikontrol di RRT vs. media yang bebas di Indonesia;
- Sistem politik satu partai di RRT vs. sistem banyak partai di Indonesia, di samping pemilihan umum yang bebas;
- Lingkungan di Indonesia yang memungkinkan perkembangan OMS vs. masyarakat sipil yang lemah di RRT; dan
- Kemauan politik yang positif dari pihak pemerintah Indonesia terhadap anggaran terbuka vs. Penolakan pemerintah RRT untuk membuka anggarannya.

Meskipun terdapat batasan dalam memajukan pekerjaan anggaran di RRT, peserta juga melihat ruang-ruang dan peluang yang sedang terbuka, di saat pemerintah telah mulai mendorong inovasi untuk menangani berbagai masalah sosial dan membeli layanan sosial dari OMS.

Berbagi pengalaman bersama telah mengilhami dan memberikan pencerahan pada para peserta dari RRT. Sebagian di antaranya mempelajari bahwa advokasi anggaran merupakan inti partisipasi publik, sementara lainnya menyadari bahwa kerjasama dengan pemerintah dan pengambil keputusan dapat diterapkan di RRT. Yang lainnya menyadari bahwa pembinaan kemampuan bagi pejabat pemerintah lokal, anggota komunitas, dan OMS sendiri, di samping berbagai landasan atau mekanisme untuk dialog merupakan hal yang mendasar bagi pekerjaan anggaran. Semua peserta mengakui bahwa peta siklus anggaran yang mengidentifikasi pemangku kepentingan dan meliputi jadwal proses anggaran yang dipersiapkan oleh OMS Indonesia merupakan sarana yang sangat berguna yang ingin mereka kembangkan untuk digunakan di negara mereka.

Studi wisata tersebut ternyata saling menguntungkan karena organisasi-organisasi di Indonesia dapat memetik lebih banyak pelajaran mengenai pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh para mitra mereka dari RRT. Semua peserta berharap akan terus melakukan dialog satu sama lain secara teratur dan menantikan kerjasama yang berkesinambungan di masa mendatang.

Bacalah mengenai pertukaran pembelajaran lainnya dalam [seri Belajar dari Satu Sama Lain](#) milik IBP.

Kemenangan Legislatif untuk Jaminan Makanan

Menyusun Anggaran untuk Jaminan Makanan di India, oleh Ravi Duggal, *International Budget Partnership*

Perjuangan masyarakat sipil untuk memastikan hak mendapatkan makanan di India sudah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun. Pada tahun 2009, *United Progressive Alliance* (Aliansi Progresif Bersatu) berjanji akan menjamin hal ini jika dipilih melalui hukum yang serupa dengan Undang-Undang Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi, yang membantu mewujudkan Hak untuk Bekerja. Sebuah Rancangan Undang-Undang diajukan dalam parlemen, namun kemudian tertunda. Akhirnya tahun ini aliansi yang berkuasa telah memutuskan akan berusaha keras mengesahkan undang-undang itu. Pada tanggal 26 Agustus 2013, setelah terjadi perdebatan dan perubahan yang dipimpin *Right to Food Movement* (Gerakan Hak Memperoleh Makanan) dan beberapa anggota parlemen, Dewan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang yang berupaya menjamin gizi kelompok-kelompok ini:

- *antyodaya* (kaum miskin papa) dan rumah tangga yang diprioritaskan (hingga 75 persen dari rumah tangga di pedesaan dan 50 persen dari rumah tangga di perkotaan);
- semua ibu hamil dan menyusui;
- anak-anak usia enam bulan sampai 14 tahun; dan
- semua anak kurang gizi.

RUU ini juga mencakup tunjangan uang tunai persalinan untuk semua ibu.

Kebutuhan kelompok-kelompok ini sekarang sedang ditangani melalui berbagai program yang sudah ada; yang baru adalah bahwa undang-undang ini berusaha menetapkan gizi sebagai hak, yang menyiratkan akses universal. Tapi apakah alokasi dalam anggaran tahun ini memperlihatkan peralihan kebijakan ini?

Data mengenai alokasi anggaran, pembelanjaan, dan hasil-hasil yang berkaitan dengan berbagai skema dalam hal menjangkau dan menebarkan dampak itu memperlihatkan bahwa investasi yang ada adalah amat sangat tidak memadai. Pengeluaran sebenarnya mulai tahun 2010-2011 sampai 2011-2012 jelas menunjukkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan sedikit lebih dari 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menyediakan makanan dan gizi kepada masyarakat yang kurang mampu. Tingkat alokasi yang sama ini terus berlangsung hingga tahun 2014 meskipun pemerintah telah meningkatkan komitmen politiknya terhadap semua kebijakan ini. Malahan dalam hal perkembangan pembelanjaan, terjadi penurunan drastis pada pengeluaran untuk gizi, dari 17 persen dari tahun 2010-2011 sampai 2011-2012 menjadi 8 persen dari tahun 2012-2013 sampai 2013-2014. Banyak pemerintahan negara bagian mengalokasikan sumber daya yang besar untuk program makanan dan gizi dari anggaran mereka sendiri. Tahun 2010-2011, diperkirakan mencapai lebih dari 130 milyar Rupee.

Masih mengenai pengeluaran untuk jaminan makanan dan gizi, belum ada peningkatan yang signifikan dalam ketentuan anggaran meskipun ada Undang-Undang Jaminan Makanan Nasional.

Pemerintah perlu melakukan investasi yang signifikan bagi lebih banyak sumber daya dibanding saat ini agar benar-benar mewujudkan hak memperoleh makanan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk tiga hak ini saja kami akan membutuhkan minimal 10 persen dari PDB, di mana dengan harga saat ini adalah setara dengan 10 triliun Rupee. Pada tingkat nasional dan negara bagian, saat ini pemerintah membelanjakan hampir sebanyak 5 triliun Rupee untuk berbagai program yang berkaitan dengan ketiga sektor sosial ini, yang harus digandakan guna mewujudkan semua hak ini secara efektif. Meskipun hal ini tampaknya merupakan permintaan yang besar, sebenarnya tidak begitu sulit dicapai. Bebas pajak untuk perusahaan mengurangi pendapatan publik hingga lebih dari 5 triliun Rupee, dan jumlah pendapatan lain yang hilang hingga lebih dari 3 triliun Rupee. Selain menghentikan ketentuan-ketentuan yang mengurangi kumpulan dana publik, mengekang kehilangan pendapatan dari perusahaan dan orang-orang yang menempatkan kekayaannya di negara-negara yang membebaskan pajak lebih rendah atau tanpa pajak sama sekali, dapat mendatangkan dana yang amat sangat besar untuk dana publik. Tanpa membebaskan pajak

tambahan, berbagai sumber daya yang memadai dapat diperoleh untuk makanan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan dan program jaminan sosial asalkan ada kemauan politik untuk melakukannya.

Versi sebelumnya dari tulisan ini telah diterbitkan di [Economic & Political Weekly](#) edisi 26 Oktober 2013 halaman 4-5.



Sudut Blog

Dari Blog *Open Budgets*: Diskusi di [#OGP13](#)

IBP berpartisipasi dalam [Pertemuan Puncak Tahunan Government Partnership](#) di London pada tanggal 30 Oktober-1 November, dihadiri lebih dari 1.000 delegasi dari 60 negara lebih. Sebagian dari tampilan pesan terbaru dalam blog kami antara lain adalah [renungan mengenai hari sebelum pertemuan puncak berisi interaksi dan peluang masyarakat sipil](#), [percakapan penting mengenai masa depan OGP](#), dan diskusi mengenai [keterlibatan warga negara dengan lembaga-lembaga audit tertinggi](#).

Perawatan Kesehatan dan Anggaran

Bagaimanakah Dana Publik di Tingkat Pedesaan Digunakan? Penelitian Mengenai Dana Fleksibel di Berbagai Fasilitas Kesehatan di India, oleh Shweta Marathe, *Support for Advocacy and Training into Health Initiatives (SATHI)*

Pada tahun 2005, pemerintah India mulai menerapkan *National Rural Health Mission (NRHM/Misi Kesehatan di Pedesaan Nasional)*, yang menyediakan dana yang fleksibel kepada berbagai lembaga kesehatan untuk memajukan perawatan kesehatan yang dapat terjangkau dan efektif bagi masyarakat desa. Dana-dana inovatif ini mencakup *Annual Maintenance Grant* (Hibah Pemeliharaan Tahunan/AMG), *Patient Welfare Grant* (Hibah Kesejahteraan Pasien/PWG), dan *Untied Funds* (Dana Tidak Terikat/UF).

Mengenai penelitian ini

Patients' Welfare Committees (Komite Kesejahteraan Pasien/PWC) telah didirikan di berbagai fasilitas kesehatan guna memastikan penggunaan dana NRHM dengan semestinya. Melalui *Community-Based Monitoring and Planning Process* (Proses Perencanaan dan Pemantauan Berbasis Masyarakat/CBMP), sudah berulang kali dilaporkan bahwa telah terjadi beberapa masalah pada pembelanjaan dana-dana tersebut dan fungsi PWC.¹ Mengingat hal ini, sebuah penelitian dirancang untuk mengevaluasi bagaimana dana-dana tersebut dikelola dengan cara melacak pengeluaran, dan bagaimana catatan pengeluaran itu diatur. Dari total 15 pusat kesehatan utama (*Primary Health Center/PHC*) di bawah

¹ Menurut NRHM, proses *Community Based Monitoring and Planning* (CBMP) diterapkan di 13 daerah yang dipilih. SATHI adalah organisasi nirlaba di negara bagian untuk menerapkan proses ini di Maharashtra.

pemantauan berbasis masyarakat di Daerah Pune, lima di antaranya dipilih melalui pengambilan sampel secara acak, dan data dikumpulkan untuk tahun anggaran 2010-2011 dan 2011-2012.

Penemuan Pokok

- **Terjadi peningkatan infrastruktur, namun tanpa pengeluaran untuk inovasi.** Menurut penelitian ini, dana-dana tersebut biasanya digunakan untuk biaya operasional dan pengeluaran modal, termasuk pembelian dan pemeliharaan peralatan, bahan, dan fasilitas. Penggunaan dana secara inovatif untuk kesejahteraan pasien tidak diamati di PHC manapun yang dipilih, meskipun diperkirakan.
- **Pembelian dilakukan tanpa menilai kebutuhan pasien.** Dalam beberapa kejadian, bahan dan peralatan dibeli oleh pejabat tingkat daerah tanpa berkonsultasi dengan PHC lokal. Karena jumlah staf yang tidak memadai, kurangnya infrastruktur dasar, dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada permintaan infrastruktur, semua pembelian itu saat ini tidak digunakan.
- **Pembelian lokal untuk obat-obatan yang biasanya diperlukan memperlihatkan kurangnya persediaan di tingkat daerah.** Meskipun menurut pedoman, dana hanya boleh digunakan untuk membeli obat-obatan dalam keadaan darurat, 25-30 persen dari dana itu digunakan untuk pengadaan obat-obatan yang biasanya diperlukan.
- **Kurangnya keterlibatan anggota-anggota PWC dalam pengambilan keputusan.** Hanya ada 10-20 persen keputusan yang diambil oleh anggota PWC; **dan bahkan ada kejadian** di mana ada anggota-anggota yang tidak tahu bahwa mereka adalah anggota PWC.
- **Dana PWC paling sedikit digunakan. Dalam kedua tahun anggaran, 40 persen dari PWG digunakan dalam PHC yang diteliti, dibandingkan 70 persen dana UF dan 80 persen dana AMG.** Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa, menurut pedoman, hibah AMG dan UF dibayarkan setelah memotong jumlah saldo tahun sebelumnya, sementara hibah PWG dibayarkan kepada semua lembaga kesehatan tanpa memandang saldo tahun lalu. Jadi jika saldo PWG yang berjumlah besar dikompensasikan ke tahun berikutnya, maka sedikit dari dana baru tersebut yang akan digunakan.
- **Pembukuan yang tidak beraturan.** Menurut penelitian tersebut, rincian-rincian penting, termasuk tanggal dan tanda tangan penerima, tidak dicantumkan dalam 70-80 persen dari total tagihan dan *voucher*. Pada beberapa tagihan, juga ada penindihan tulisan, dan tidak ada satu pun dari PHC yang diteliti itu pernah didatangi oleh auditor manapun.

Penemuan ini jelas memperlihatkan perlunya perencanaan pengeluaran dan keterlibatan anggota PWC dalam proses perencanaan. Untuk tujuan ini, penelitian tersebut menyarankan hal-hal berikut:

- Orientasi dan lokakarya harus diorganisir untuk membantu membina kemampuan anggota PWC dan mengajarkan mereka tentang perencanaan kesehatan yang terdesentralisasi.
- Rapat panitia harus diadakan secara teratur dan anggota-anggota harus berpartisipasi secara aktif dalam setiap rapat.
- Keputusan berdasarkan kebutuhan mengenai pengeluaran dana harus dilakukan oleh anggota panitia saja.
- Menindak lanjuti dan melaksanakan keputusan yang diambil selama rapat.
- Anggota panitia harus dilatih mengenai pedoman penggunaan dana.
- Transparansi dalam pengeluaran dana harus didorong.
- Harus ada mekanisme untuk memantau pengeluaran dana.

Meskipun dana fleksibel yang disediakan oleh NHRM amat sangat mungkin berpengaruh positif pada kehidupan dan kesehatan masyarakat pedesaan, masalah-masalah yang dihadapi program ini jangan diabaikan.

Anggota panitia harus memikul tanggung jawab mereka secara aktif, dan pemerintah harus menyediakan pelatihan yang tepat waktu, menekankan perencanaan, menciptakan mekanisme untuk memantau pengeluaran, dan mempertimbangkan semua saran di atas untuk penggunaan dana dengan lebih baik. Baru kemudian tujuan dana-dana tersebut dapat benar-benar diwujudkan.

Dengan penuh terima kasih, penulis mengakui organisasi-organisasi peserta di Pune atas kerjasama mereka dalam pengumpulan data dan Deepali Yakkundi atas bantuannya dalam pemrosesan data dan analisa.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pekerjaan SATHI, harap kunjungi [situs web](#) mereka atau [hubungi penulis](#).

Publikasi

Publikasi IBP

Belum lama ini IBP menambahkan beberapa publikasi baru di [perpustakaan](#) online kami. Arahan Singkat mengenai Anggaran dan Catatan Kebijakan yang Baru ini berfokus pada transparansi dan partisipasi anggaran serta pemberian layanan dalam berbagai konteks negara:

- [Arahan Singkat Mengenai Anggaran No. 20 – Kepada Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran Tingkat Kabupaten di Kenya: Prinsip-prinsip dan Pelajaran dari *Local Authority Service Delivery Action Program* \(LASDAP\) Sebelumnya](#)
- [Berbagai Tantangan Utama dan Peluang untuk Transparansi Anggaran di Tunisia](#)
- [Mendapatkan Kursi di Meja: Advokasi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Anggaran di Negara-negara yang “Tidak Transparan”](#)

Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini - Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.

Pada tanggal 24-26 Oktober, Konferensi Global Mengenai Penelitian Transparansi ke-3 telah berlangsung. Konferensi itu mengumpulkan para akademisi, pembuat kebijakan, dan perwakilan kelompok kepentingan guna membahas dan menyajikan penelitian mengenai berbagai macam masalah transparansi, termasuk akses ke informasi pemerintah dan hubungan transparansi antara pemerintah dan badan swasta/nirlaba dan di kalangan badan pemerintah. [Makalah yang disajikan dalam konferensi](#) tersebut mencakup berbagai macam masalah mengenai transparansi, misalnya ekosistem pertanggungjawaban dan transparansi serta kepercayaan.

Dalam artikel “[Transparansi dan Siklus Anggaran Politik di Tingkat Kotamadya](#),” yang diterbitkan di *Swiss Political Science Review*, para penulis dari *University of Murcia* menganalisa pengaruh transparansi keuangan tingkat kotamadya pada besarnya siklus anggaran politik. Untuk kotamadya-kotamadya terbesar di Spanyol pada tahun 1999-2009, para penulis menggunakan indeks transparansi keuangan dari *Transparency International Spain* untuk memperlihatkan bagaimana transparansi di tingkat kotamadya berpengaruh pada total pengeluaran, pengeluaran modal, dan pajak di tingkat kotamadya.

Dalam sebuah makalah baru-baru ini yang berjudul, “[The MDGs, Empowerment and Accountability in Africa: Retrospect and Prospects \(MDG, Pemberdayaan dan Pertanggungjawaban di Afrika: Retrospeksi dan Prospek](#),” yang diterbitkan di *IDS Bulletin*, menyoroti sebagian ketidakpuasan terhadap dampak yang

ditimbulkan tata kelola pemerintahan dari *Millennium Development Goals* (Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs) di Afrika. Penulis makalah menyoroti perlunya perhatian yang lebih cermat terhadap konteks, lembaga, dan pelaku lokal di Afrika dan lebih sedikit pendekatan yang didominasi donor terhadap agenda pembangunan global pasca tahun 2015 dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan demokratis.

Lowongan Kerja

Lowongan IBP yang Tersedia: Petugas Program Pelatihan

IBP sedang mencari **Petugas Program Pelatihan** untuk tim Pembinaan Kemampuan, yang memimpin pelatihan dan dukungan pembelajaran untuk semua program tingkat negara IBP yang bertujuan mengalihkan kebijakan anggaran nasional dan sub nasional, proses, dan hasil-hasil menuju peningkatan transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban. **Petugas Program Pelatihan** diharapkan untuk memimpin konseptualisasi, rancangan, penyediaan, dan evaluasi intervensi pembinaan kemampuan tertentu yang ditawarkan oleh mitra-mitra IBP.

[Ketahuilah lebih jauh](#) mengenai lowongan ini dan cara melamar.